

**HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKUKAN SECARA
AGAMA ISLAM TANPA MELALUI PROSES PENGADILAN
AGAMA (STUDI KASUS PERCERAIAN DI KAMPUNG
SINGARAJA)**

Oleh

Wahyu Reza Adinugraha , NIM . 1614101033

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perceraian yang dilakukan secara agama islam tanpa melalui proses pengadilan agama (studi kasus perceraian di kampung singaraja) serta Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih proses perceraian Hukum Islam (talak) tanpa melalui proses Pengadilan Agama Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif, dimana menggambarkan secara nyata mengenai keadaan-keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Data Primer dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kampung Singaraja Kabupaten Buleleng, kemudian data Sekunder yaitu bahan Hukum primeryaitu data yang didapat dari hasil wawancara secara langsung, bahan hukum sekunder bersumber dari seperti buku, tesis, disertai jurnal, majalah, dan artikel penelitian yang berkaitan dengan penelitian, serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara.Teknik penentuan sampel penelitian adalah teknik *non probabilitysampling*, kemudian Data penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Perceraian Yang Dilakukan Secara Agama Islam Tanpa Melalui Proses Pengadilan Agamadiolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Akibat Hukum Dari Hasil Perceraian Hukum Islam Yang Dilakukan Di Kampung Singaraja tidak ada akibat hukum menurut Undang-undang perkawinan. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih proses perceraian Hukum Islam (talak) tanpa melalui proses Pengadilan Agama Singaraja Kurang pahamnya masyarakat terhadap hukum, sudah menjadi kebiasaan, keadaan ekonomi masyarakat dan memerlukan biaya serta waktu yang cukup banyak.

Kata-kata kunci: Perkawinan, perceraian, UU No 16 Tahun 2019, Kampung Singaraja

THE LAW OF DIVORCE CONDUCTED BY ISLAMIC RELIGION WITHOUT THROUGH THE PROCESS OF RELIGION COURT (CASE STUDY OF DIVORCE IN SINGARAJA VILLAGE)

By:

Wahyu Reza Adinugraha 1614101033
Law Department

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of divorce conducted in Islam without going through a religious court process (divorce case study in Singaraja village) as well as factors that cause the community to prefer the Islamic Law divorce process (talak) without going through the Singaraja Religious Court process. This type of research is a type of empirical legal research, the nature of the research used in this study is descriptive, which describes clearly about the conditions or symptoms that exist in society. Primary data in this study were sourced from field research conducted in Singaraja Village, Buleleng Regency, then Sekuder data, namely primary legal material, data obtained from direct interviews, secondary legal material sourced from books, theses, accompanied by journals, magazines, and research articles related to research, as well as tertiary legal materials such as the Big Indonesian Dictionary and the Law Dictionary. Data collection techniques used are document study techniques, observation techniques, and interview techniques. The technique of determining the research sample is a non probability sampling technique, then the research data relating to the implementation of Divorce conducted in Islam without going through the Religious Court Process are processed and analyzed qualitatively. The results showed (1) The Legal Consequences of the Divorce Results of Islamic Law Conducted in Singaraja Village, there were no legal consequences according to the marriage law. (2) Factors that cause the community to prefer the divorce process of Islamic law (divorce) without going through the Singaraja Religious Court process. The lack of understanding of the community towards law, has become a habit, the economic situation of the community and requires considerable cost and time.

Key words: Marriage, divorce, UU No 16 Tahun 2019, Singaraja Village